

# **TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI**

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Ahmad Bujairomi Ahda**

**NPM. 7222800020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

# **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Bujairomi Ahda**

NPM : 7222800020

Jenjang : Strata 2 (S-2)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, bila ternyata di kemudian hari diketahui ada yang tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya.

 Tegal, 23 Januari 2025

 Yang menyatakan

 **Ahmad Bujairomi Ahda**

# **PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Tesis dengan Judul **“TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI”** Karya,

Nama : **Ahmad Bujairomi Ahda**

NPM : 7222800020

Progam Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2025.

Tegal, 23 Januari 2025

**Panitia Ujian**

 **Ketua Penguji Sekretaris**

 **Dr. Taufiqullah, M.Hum. Dr. Tity Kusrina, M.Pd.**

 **NIDN 0615087802 NIDN 0630086401**

 **Penguji Utama Penguji I**

****

 **Dr. Nuridin, S.H., M.H. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.**

 **NIDN 0610116002 NIDN 0606066001**

**Penguji II**



 **Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

**NIDN 0609086202**

 **Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi**



 **Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

 **NIDN 0606066001 NIDN 0609086202**

# ***ABSTRACT***

***Ahmad Bujairomi Ahda****. Violent Crimes Committed by Children from a Criminological Perspective. Thesis. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2025. Supervisor I, Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., Supervisor II, Dr. Sanusi, S.H., M.H.*

*The criminal acts of violence committed by children have shown a significant increasing trend in recent years, making it an important concern in criminological studies. This study aims to address two main research questions: what are the dominant factors contributing to violent crimes committed by children from a criminological perspective, and what countermeasures can be taken? This research employs a normative-empirical method to analyze the collected data.*

*The findings indicate that violent crimes committed by children are influenced by two major factors: internal and external. Internal factors include the child's individual characteristics, such as age, education level, intelligence, and family conditions. Meanwhile, external factors consist of environmental influences, including peer associations and media exposure, particularly social media. Among these factors, family conditions have been identified as the most dominant factor in triggering violent crimes among children. This factor serves as a gateway to other negative influences, such as unfavorable social environments and uncontrolled exposure to digital media.*

*To address this issue, two types of countermeasures are necessary: preventive and restorative. Preventive measures focus on reducing violent crimes through public awareness campaigns and anti-violence programs involving law enforcement, government, media, and society. Meanwhile, restorative measures emphasize legal enforcement that upholds the principles of restorative justice. These measures include the imposition of appropriate sanctions, whether in the form of criminal penalties, corrective actions, or diversion agreements, all of which must prioritize the best interests of the child.*

***Keywords****: Violent Crimes, Children, Criminology, Causal Factors, Countermeasures.*

# **ABSTRAK**

**Ahmad Bujairomi Ahda**. *Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Dalam Sudut Pandang Kriminologi*. Tesis. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2025. Dosen Pembimbing I, Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, Dr. Sanusi, S.H., M.H.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi perhatian penting dalam studi kriminologi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: faktor dominan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan dalam sudut pandang kriminologi, serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan oleh anak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup karakteristik individu anak, seperti usia, tingkat pendidikan, kecerdasan, serta kondisi keluarga. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan pergaulan dan media, khususnya media sosial. Dari keseluruhan faktor yang dianalisis, faktor keluarga terbukti sebagai faktor paling dominan yang memicu tindak pidana kekerasan oleh anak. Faktor ini menjadi pemicu utama bagi pengaruh negatif lainnya, seperti lingkungan sosial yang tidak kondusif dan paparan teknologi media informasi yang tidak terkontrol.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan ini, diperlukan dua bentuk penanggulangan, yaitu penanggulangan preventif dan restoratif. Penanggulangan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye anti-kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah, media, dan masyarakat untuk mencegah tindak pidana kekerasan oleh anak. Sementara itu, penanggulangan restoratif dilakukan dengan penegakan hukum yang tetap berlandaskan prinsip keadilan restoratif. Upaya ini mencakup pemberian hukuman yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik melalui pidana, tindakan, maupun mekanisme diversi.

**Kata Kunci**: Tindak Pidana Kekerasan, Anak, Kriminologi, Faktor Penyebab, Penanggulangan.

# **“Motto”**

***“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”***

***(Tan Malaka)***

 **Persembahan :**

* Alm. K.H. Abdullah Jamil dan Ny.Hj. Farkhiyah selaku Orang Tuaku, yang telah mendoakan dalam setiap sujud, dan setiap saat yang tak pernah bosan memberikan cinta kasihnya, dorongan, semangat, semua demi kelancaran saya dalam berjuang.
* Keluarga kecilku, Istri tersayang Ny. Ardiana Putri Dewi dan dua balita imut Izora Abra Fahima dan Sheza Abra Aqila yang selalu memberi kebahagiaan di setiap detiknya.
* Teman-temanku Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal terutama sahabat sahabatku yang telah selalu memberikan semangat motivasi dan dedikasi tinggi terhadap saya.
* untuk diri Saya sendiri yang sampai saat ini masi berjuang dan bisa bertahan sampai di titik ini, walaupun masih ada banyak mimpi/keinginan yang ingin Saya wujudkan satu persatu, semoga kelak bisa bertahan dan berjuang mewujudkan mimpi mimpi itu bersama keluarga tersayang.
* Bapas Kelas II Pekalongan dan Bapas Kelas I Surakarta.
* Almamater

# **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt, Alhamdulillah penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam. Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, S.Pd., M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal;
2. Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., M.H. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini;
3. Dr. Sanusi, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini;
4. Segenap Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 2. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih;
5. Ibu tercinta, Nyai Hj. Farkhiyah binti K.H. Abdul Mumit yang selalu memberikan cinta dan dukungannya kepada putranya, semoga panjang umur selalu;
6. Almarhum Ayahanda tersayang, K.H. Abdullah Jamil bin H. Abdul Jamil yang selalu menjadi *role model* bagi anak-anaknya;
7. Keluarga kecilku, Istri tersayang Ny. Ardiana Putri Dewi dan dua balita imut Izora Abra Fahima dan Sheza Abra Aqila yang selalu memberi kebahagiaan di setiap detiknya;
8. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pacasarjana Universitas Pancasakti Tegal atas kerjasama dan kesediaan waktunya untuk berbagi ilmu dalam pengerjaan tugas;
9. Segenap Staff administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Magister Ilmu Hukum yang Telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah;
10. Semua pihak yang sudah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

 Tegal, 23 Januari 2025

 **Ahmad Bujairomi Ahda**

# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : **Ahmad Bujairomi Ahda**

NPM : 7222800020

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 11 Maret 1993

Program Studi : Magister Hukum

Alamat : Komplek Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Jl. KH. Abdullah Jamil Ds. Karangjati RT03/RW01 Kec. Tarub Kab. Tegal.

Instansi : Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Riwayat Pendidikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1 | SD Negeri Karangjati 01 Tegal | 1998 | 2004 |
| 2 | SMP NU 01 Hasyim Asy’ari Tarub Tegal | 2004 | 2007 |
| 3 | SMA NU 01 Hasyim Asy’ari Tarub Tegal | 2007 | 2010 |
| 4 | S1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | 2010 | 2014 |
| 5 | S2 Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal  | 2023 | 2024 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

 Tegal, 23 Januari 2025

 Hormat saya,

 **Ahmad Bujairomi Ahda**

# **DAFTAR ISI**

[Halaman Judul i](#_Toc187664496)

[Halaman Pernyataan Keaslian ii](#_Toc187664497)

[Halaman Pengesahan Ujian Tesis iii](#_Toc187664498)

[Halaman Persetujuan Pembimbing Tesis iv](#_Toc187664499)

[*Abstract* v](#_Toc187664500)

[Abstrak vi](#_Toc187664501)

[Motto dan Persembahan vii](#_Toc187664502)

[Kata Pengantar viii](#_Toc187664503)

[Daftar Riwayat Hidup x](#_Toc187664504)

[Daftar Isi xi](#_Toc187664505)

[Daftar Tabel xiii](#_Toc187664506)

[Daftar Lampiran xiv](#_Toc187664507)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc187664508)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc187664510)

[B. Rumusan Masalah 10](#_Toc187664513)

[C. Tujuan Penelitian 10](#_Toc187664514)

[D. Manfaat Penelitian 11](#_Toc187664515)

[E. Originalitas Penelitian 12](#_Toc187664516)

[BAB II TINJAUAN TEORI 14](#_Toc187664517)

[A. Kerangka Konseptual 14](#_Toc187664519)

[B. Kerangka Teoritik 15](#_Toc187664520)

1. [Teori Kenakalan Remaja 15](#_Toc187664521)

[2. Teori Penanggulangan Kejahatan 16](#_Toc187664522)

[3. Pengertian Kejahatan 19](#_Toc187664523)

[4. Kejahatan kekerasan 22](#_Toc187664524)

[5. Ruang Lingkup dan Bentuk Kejahatan Kekerasan 23](#_Toc187664525)

[6. Pengertian Anak 25](#_Toc187664526)

[7. Kriminologi 28](#_Toc187664527)

[BAB III METODE PENELITIAN 30](#_Toc187664528)

[A. Metode Penelitian 30](#_Toc187664530)

[1. Jenis Penelitian 31](#_Toc187664531)

[2. Pendekatan Penelitian 32](#_Toc187664532)

[3. Sumber Data 33](#_Toc187664533)

[4. Metode Pengumpulan Data 34](#_Toc187664534)

[5. Metode Analisis Data 35](#_Toc187664535)

[B. Jadwal Penelitian 37](#_Toc187664536)

[BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38](#_Toc187664537)

[A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38](#_Toc187664539)

[B. Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak 45](#_Toc187664540)

[C. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak 82](#_Toc187664541)

[BAB V SIMPULAN](#_Toc187664542) [99](#_Toc187664543)

[A. Kesimpulan 99](#_Toc187664544)

[B. Saran 100](#_Toc187664545)

[DAFTAR PUSTAKA 102](#_Toc187664546)

[LAMPIRAN-LAMPIRAN 118](#_Toc187664547)

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan Tahun 2021-2023..................................................................................3

Tabel 1.2 Data Kasus Residivis Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Tahun 2021-2023.....................................................................................................4

Tabel 2.1 Originalitas Penelitian............................................................................12

Tabel 4.1. Data Pendampingan ABH Tahun 2022..................................................48

Tabel 4.2. Data Pendampingan ABH Tahun 2023..................................................51

Tabel 4.3. Data Pendampingan ABH Tahun 2024..................................................53

Tabel 4.4. Data ABH Tindak Pidana Kekerasan.....................................................67

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Data kuisioner wawancara ..............................................................106

Lampiran 2. Data ABH Tindak Pidana Kekerasan...............................................118

Lampiran 3. Data Pendampingan ABH Tahun 2022-2024..................................123

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **Latar Belakang**

Fenomena tindak pidana kekerasan oleh anak semakin marak terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi keprihatinan bagi berbagai pihak mengingat anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi dan dibina karena ke depannya, merekalah masa depan generasi bangsa yang akan memimpin Indonesia. sedemikian pentingnya perlindungan bagi anak tampak dalam banyaknya regulasi untuk melindungi kepentingan anak sejak anak terlahir di dunia. Sebagai contohnya, orangtua sebagai sosok pertama yang dikenal anak sejak lahir diberikan tanggung jawab untuk tidak mengabaikan anak dan memastikan kelangsungkan hidup anak Anak merupakan tanggung jawab orang tua dan tidak boleh diabaikan. Hal ini diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang mengatur bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengasuh anaknya yang belum dewasa sampai ia mencapai usia dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri. Kemudian dipertegas juga dalam Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial(Abdurrachman dkk., 2015, hlm. 168).

Mirisnya, sekalipun sudah banyak regulasi hukum yang mengatur dan mendesain agar anak mendapatkan pendidikan, pengasuhan, serta kesejahteraan rohani, jasmani maupun sosial, namun nyatanya saat ini justru makin marak anak-anak yang melakukan perbuatan buruk berujung pidana. Meningkatnya kasus anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah isu yang sangat serius serta mengkhawatirkan dalam realitas masyarakat saat ini. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan permasalahan sosial semata, tetapi juga menjadi sebuah sinyal peringatan yang berbahaya bagi generasi penerus bangsa. Maraknya anak-anak yang terlibat dalam perkara-perkara kriminal menunjukkan adanya kemunduran dalam pembentukan nilai dan moral di kalangan generasi muda.

 Artikel berjudul “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara” yang ditulis oleh Yohanes Advent Krisdamarjati dan dipublikasikan di kompas.id menjelaskan bahwa Menurut data dari DitjenPas Kemenkumham RI, tren kasus anak yang berkonflik dengan hukum meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak yang terlibat dalam konflik hukum. Sebanyak 1.467 di antaranya masih ditahan dan sedang menjalani persidangan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman penjara.

Anak-anak yang ditahan ditempatkan di berbagai tempat pemasyarakatan. Saat ini ada 1190 anak binaan yang dibina di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), 234 di lembaga pemasyarakatan (lapas), 53 di rumah tahanan negara (rutan), dan 7 di lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP). Angka tersebut kemungkinan masih akan bergerak naik karena tahun 2023 masih empat bulan lagi.

 Lebih lanjut, dalam artikel yang sama menyebutkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan dari data yang telah dikumpulkan, bahwa kekerasan fisik dan kekerasan seksual adalah dua jenis kriminal yang paling sering dilakukan oleh anak-anak. Pada tahun 2020, tindak kekerasan fisik menyumbang 29,2% dari semua tindak pidana, sementara kekerasan seksual menyumbang 22,1%. KPAI juga mencatat sejumlah tindak kriminal lainnya pada tahun 2020. Ini termasuk kecelakaan lalu lintas (10,6 persen), pemilikan senjata tajam (5,5 persen), pencurian (11,2 persen), aborsi (5,0 persen), kekerasan psikis seperti intimidasi dan ancaman (5,5 persen), pedofilia atau sodomi (5,5 persen), dan pembunuhan (4,0 persen).

 Selain itu, berdasarkan data yang didapatkan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes, didapatkan data perkara kekerasan oleh anak sebagai berikut:

# **Tabel 1.1**

**Data Kasus Kekerasan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan**

**Tahun 2021-2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Tindak Pidana | Tahun |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Kekerasan Fisik | 16 | 30 | 90 |
| Kekerasan Seksual | 17 | 15 | 26 |
| Jumlah | 33 | 30 | 116 |

*Sumber: Data Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan*

# **Tabel 1.2**

**Data Kasus Residivis Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan**

**Tahun 2021-2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  Residivis | Tahun |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Kekerasan Fisik | 0 | 0 | 3 |
| Kekerasan Seksual | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 3 |

*Sumber: Data Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan*

 Angka di atas memberikan petunjuk bahwa Tindak pidana kekerasan dengan pelaku anak merupakan salah satu isu sosial yang semakin mendalam di tengah masyarakat modern saat ini. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik seperti *bullying* dan tawuran.

Terkait dengan kekerasan seksual, berdasarkan jurnal berjudul “Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual” mendapatkan hasil bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum terkait kejahatan seksual memiliki dorongan seksual yang kuat serta kurangnya kemampuan untuk mengendalikan dorongan hasrat tersebut. Meskipun beberapa anak menunjukkan rasa penyesalan serta harapan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut setelah keluar dari lembaga pembinaan, namun ada juga yang tidak menunjukkan penyesalan dan memiliki risiko kemungkinan besar akan mengulangi perbuatan yang sama(Rochmah dkk., 2015).

Kemudian, Dalam jurnal “Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan”, didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peristiwa tawuran Manggarai dan sekitarnya merupakan fenomena menahun, berlangsung lama dan diwariskan lintas generasi. Tawuran dinilai merupakan sebuah budaya kekerasan yang berujuk pada tindak kejahatan, dan tawuran dianggap sebagai "produk/hasil/ciptaan" dari budaya tersebut. Para pelaku tawuran menganggap tawuran sebagai perbuatan yang wajar dan bukanlah suatu kejahatan. Para Pelaku melancarkan aksi tawuran dengan dalih untuk membela kampungnya serta harga diri mereka. Tawuran juga dianggap sebagai cara serta sarana untuk meluapkan amarah dan mempertahankan kebanggaan akan kampungnya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi tawuran, nyatanya fenomena ini masih tetap saja berlanjut dan telah menjadi bagian dari subkultur budaya di wilayah Manggarai(Alviani & Osmawati, 2021).

Pengaruh teman sebaya juga turut memberikan andil terjadinya tindak pidana oleh anak, berdasarkan jurnal tahun 2019 “Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja Sekolah di Samarinda”, kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh/efek nyata teman sebaya/ teman sepermainan terhadap perilaku kenakalan para remaja. Mayoritas remaja yang terpengaruh oleh teman sebaya cenderung melakukan kenakalan seperti melakukan perkelahian/tawuran, menonton film porno, dan merokok. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh teman sebaya meningkatkan peluang menjadi 1,7 (satu koma tujuh) kali lebih besar untuk melakukan kenakalan(Tianingrum & Nurjannah, t.t.).

Tindak pidana yang dilakukan anak-anak ini, khususnya tentang kekerasan ini biasa kita kenali dengan istilah kenakalan remaja. para ahli memaknai kenakalan remaja dengan pengertian di bawah ini:

1. Kartono, ilmuwan sosiologi

“*Juvenile Delinquensy* atau dalam bahasa indonesianya dikenal dengan nama Kenakalan Remaja merupakan wujud dari pertanda patologis sosial yang terjadi di masa remaja sebagai hasil sebab dari adanya bentuk ketidakacuhan sosial. Akibatnya, remaja pun mulai melakukan beberapa perilaku yang menyimpang".

1. Santrock

"Kenakalan remaja dimaknai sebagai rangkuman berbagai macam perilaku remaja yang tertolak/tidak dapat diterima secara sosial hingga menyebabkan terjadinya tindakan/perilaku kriminal."

Adanya Pengaruh kultural dan sosial nyata-nyata sangat berpengaruh dalam menghasilkan atau mengontrol perilaku kriminal pada anak-anak remaja. Perilaku para remaja ini menampakkan adanya sinyal-sinyal ketidaksesuaian dengan norma sosial, dan kebanyakan gejala kenakalan ini terjadi pada remaja berusia 21 tahun atau lebih(Karlina, t.t.).

Remaja mengalami konflik batin karena konflik antara keinginan untuk melakukan perbuatan tercela berujung kriminal dan perasaan untuk tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, konflik batin ini dihidupkan oleh remaja melalui perilaku primitif, impulsif, serta agresif. Akibatnya, remaja yang melakukan tindakan tercela yaitu kriminal ini biasanya dekat dan lekat dengan sikap temperamen, konflik batik, kekacauan kejiwaan, hingga rasa frustrasi, yang pada akhirnya membawa mereka untuk meluapkan konflik-konflik tersebut dalam bentuk tindakan kriminal. Karena itu, dari perspektif hukum, remaja termasuk dalam kategori anak(Amalia & Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, t.t.).

Dalam penerapan hukumnya ketika anak melakukan tindak pidana, Konvensi Hak Anak (KHA) memberikan dasar berikut sebagai landasan penerapan praktik perkara pidana anak(Setyorini dkk., t.t.):

1. Mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap masalah yang berkaitan dengan anak (termaktub di Pasal 3 dalam KHA);
2. Menjunjung tinggi prinsip nondiskriminasi, tidak peduli warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnis, agama, kecacatan, kekayaan, ataupun status/kondisi lain dari anak maupun orangtuanya;
3. Hak anak atas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup (termaktub di Pasal 6 dalam KHA);
4. Hak anak untuk berpartisipasi dalam kaitannya segala keputusan-keputusan yang akan berpengaruh bagi mereka, seperti hak untuk didengarkan/diperhatikan pendapat mereka ketika persidangan (termaktub di Pasal 12 dalam KHA).

Kemudian, Dengan adanya Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalamnya memuat keseluruhan setiap proses penyelesaian dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai sejak tahap penyelidikan hingga pada ujungnya adalah tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Lebih lanjut, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa “SPPA dilaksanakan berdasarkan asas: a. pelindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.” Kemudian, pasal 5 ayat 1 disebutkan juga bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Akan tetapi, Berdasarkan jurnal tahun 2020 berjudul “The Application Of Restorative Justice System Through The Diversion Of Children In Conflict With Laws In Central Java Polda (Regional Police Of The Republic Of Indonesia”, didapatkan kesimpulan bahwa pada realitanya, implementasi keadilan restoratif/Restorative Juctice (RJ) melalui jalur diversi terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum di Polda Jawa Tengah masih menemui banyak kegagalan. Faktor-faktor seperti ketidakteraturan dalam pelaksanaan diversi oleh penyidik anak, kurangnya inisiatif dari penyidik anak, kurangnya dukungan masyarakat, ketidaksepakatan antara korban atau keluarga korban dengan pelaku atau keluarga pelaku, dan kurangnya fasilitas serta infrastruktur yang memadai, nyatanya menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan diversi. Oleh karena itu, diperlukan kiranya rekonstruksi pendekatan sistem keadilan restoratif untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum(Sudewo dkk., 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam ilmu hukum pidana terdapat ilmu Kriminologi. Kriminologi muncul sebagai bidang studi ilmiah pada abad pertengahan. Ini mencakup bukan saja teori dan metodologi penelitian khusus, tetapi juga masalah kejahatan dan pengendaliannya. Ada dua kelompok ahli kriminologi yang berbeda dalam merumuskan definisi kejahatan. Yang pertama mengikuti rumusan hukum tentang kejahatan (*legal definition of crime*) dan yang kedua mengikuti rumusan nonhukum tentang kejahatan (*legal definition of crime*)(Fakultas dkk., t.t.).

Ditinjau dari sudut pandang kriminologi, Dalam konteks permasalahan maraknya anak yang berkonflik dengan hukum, perspektif kriminologi dapat membantu menemukan alasan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Kriminologi memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana masyarakat bisa/dapat/mampu memberantas dan menghindari kejahatan dengan hasil yang baik. Kriminologi berusaha untuk mengantisipasi dan bertindak atas semua kebijaksanaan di bidang hukum pidana untuk menghindari hasil yang merugikan bagi para pihak, baik pihak pelaku, korban, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi berusaha menjelaskan identitas dan alasan kriminalitas untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan sosial saat ini dan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas maka persoalan terkait dengan faktor-faktor dominan terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam penulisan ini pengkajian tersebut dilakukan penulis dengan suatu penelitian yang berjudul “TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI”.

# **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor dominan apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak?
2. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan oleh anak?

# **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diselenggarakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji faktor dominan terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak
2. Untuk mengkaji penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak.

# **Manfaat Penelitian**

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini akan membawa gagasan kepada dunia akademis dan masyarakat sehingga hasil penelitian tersebut nantinya dapat menjadi bahan referensi tambahan sebagai sumber perpustakaan bagi para sarjana. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan penjelasan mengenai pengaturan pidana terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dan menjelaskan faktor-faktor dominan terjadinya kekerasan pada anak dari sudut pandang kriminologi. Oleh karena itu, secara tidak langsung penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada penulis dan pembaca.

1. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dalam membantu aparat penegak hukum seperti Polisi dalam memahami faktor-faktor dominan terjadinya kejahatan kekerasan oleh anak. Pengetahuan ini penting untuk merencanakan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

Dengan mengetahui faktor-faktor dominan terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak, juga memudahkan pembimbing kemasyarakatan dalam menyusun program pembinaan dan pembimbingan yang sesuai terhadap anak yang melakukan kejahatan kekerasan.

# **Originalitas Penelitian**

Originalitas dalam penelitian Penelitian memberikan kontribusi berharga dalam memperluas pemahaman manusia tentang fenomena tertentu, menyelesaikan masalah baru, atau menciptakan temuan baru, ide, atau metode yang belum pernah dipublikasikan atau dipelajari secara menyeluruh oleh peneliti lain. Penulis membandingkan temuan mereka dengan studi peneliti sebelumnya di sini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian** | **Hasil Penelitiannya** | **Originalitas Penelitian** |
| 1 | A. Muhammad Agung Mulyana, 2023, Tesis Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Terhadap Anak | Penelitian berfokus pada tinjauan kriminologis anak pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap sesama anak.  | Peneliti akan fokus pada faktor dominan terjadinya kejahatan kekerasan baik fisik maupun seksual oleh anak dan cara penanggulangannya |
| 2 | Alif Kartika Irianti, 2017, Tesis Prinsip Non Diskriminasi Dalam Ketentuan Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual | Penelitian ini fokus pada penerapan prinsip non diskriminasi dalam ketentuan diversi bagi anak pelaku kekerasan.  | Peneliti akan fokus pada faktor dominan terjadinya kejahatan kekerasan baik fisik maupun seksual oleh anak dan cara penanggulangannya |
| 3 | Nunung Masitoh, 2015, Pendampingan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik Dan Seksual | Penelitian ini fokus pada pelaksanaan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual  | Peneliti akan fokus pada faktor dominan terjadinya kejahatan kekerasan baik fisik maupun seksual oleh anak dan cara penanggulangannya |

# **BAB II**

# **TINJAUAN TEORI**

# **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk menggambarkan sebuah hubungan antara konsep-konsep maupun definisi-definisi khusus yang hendak dijadikan penelitian. Kerangka konseptual menjadi sebuah pedoman konkrit dari kerangka teori. Kerangka konseptual dijadikan dasar yang dipedomani sebagai pedoman operasional dalam proses pengambilan, pengolahan, analisis, serta konstruksi data (Maiyestati, 2022).

Untuk membuat kerangka konseptual tesis yang berjudul "Tindak pidana Kekerasan Yang dilakukan Anak Dalam Sudut Pandang Kriminologi," kita perlu mengidentifikasi dan mengorganisir konsep-konsep utama yang akan diteliti serta menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Berikut penjabaran identifikasi konseptual penelitian ini dalam bentuk bagan:

# **Kerangka Teoritik**

# **Teori Kenakalan Remaja**

Teori ini menyelidiki alasan mengapa anak-anak melakukan kenakalan, atau apa yang mendorong mereka untuk melakukannya. Teori ini juga dapat disebut sebagai latar belakang dilakukannya perbuatan. Dengan kata lain, kita harus tahu apa yang mendorongnya(Hadi & Mukhlis, 2022).

Motivasi, dalam KBBI bermakna sebuah dorongan yang muncul pada seseorang baik secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu hal dengan tujuan tertentu. Selain itu, motivasi juga dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha yang mendorong seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan suatu hal karena keinginan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau karena kepuasan yang diperoleh dari tindakan mereka.

Teori ini menyelidiki alasan mengapa anak-anak menjadi nakal atau mendorong mereka. Motivasi terdiri dari dua jenis: intrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari keinginan atau hasrat seseorang sendiri yang tidak dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Motivasi ekstrinsik berasal dari dorongan yang berasal dari sumber luar.

Berikut ini Romli mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak(Hadi & Mukhlis, 2022):

1. Yang termasuk motivasi intrinsik pada kenakalan anakanak adalah:
2. Faktor usia;
3. Faktor Intelegensia;
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga;
5. Faktor kelamin.
6. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
7. Faktor media massa;
8. Faktor pergaulan anak;
9. Faktor pendidikan dan sekolah dan
10. Faktor rumah tangga.

Lebih lanjut, Menurut Jessor dalam teori perilaku bermasalah (*Problem Behavior Theory*), perilaku menyimpang pada remaja dipengaruhi oleh tiga aspek yang saling terkait. Pertama, aspek kepribadian yang mencakup nilai-nilai individu, harapan, dan pandangan yang dimiliki remaja. Kedua, aspek sistem lingkungan yang mencakup pengaruh lingkungan keluarga atau teman sebaya yang diterima oleh remaja. Ketiga, aspek sistem perilaku yang mencerminkan cara remaja bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku tidak baik yang sering kali merupakan wujud dari rasa ketidakpuasan atau kegelisahan. Tindakan ini dapat mengganggu orang lain maupun diri sendiri dan biasanya dilakukan pada masa usia remaja.

# **Teori Penanggulangan Kejahatan**

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 23). Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menyesali kejahatan yang telah mereka lakukan.

 Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)

(Barda Nawawi Arief, 2011: 4). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakata (Soejono

Dirdjosisworo, 1984: 19-20). Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata

(Moh Kemal Dermawan, 1994: 102-103).

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45), upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana(prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 46), upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

1. Jalur NonPenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

# **Pengertian Kejahatan**

Definisi kejahatan memiliki ragam yang banyak dan tidak ada yang mencakup segala aspek kejahatan. Beberapa orang memahami kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kriminologis, ataupun yuridis. Adanya beragam perbedaan makna dalam memaknai kejahatan ini disebabkan perspektif orang mengenai kejahatan sangat beragam dan tentunya jenis kejahatan yang dirumuskan turut mempengaruhi perumusan kejahatan.

 Nama atau label "kejahatan" diberikan kepada seseorang untuk menilai suatu perbuatan tertentu dimaknai sebagai perbuatan jahat. Pelaku kemudian disebut juga dengan penjahat. Definisi ini berasal dari dalam nilai, sehingga mengandung makna yang sangat relatif karena bergantung pada individu yang menyematkannya. Oleh karena itu, apa yang dinilai sebagai sebuah kejahatan oleh seseorang tidak selalu dianggap sebagai kejahatan oleh orang lain. Semua elemen masyarakat mungkin melihat suatu tindakan sebagai kejahatan, tetapi pendapat masyarakat tentang seberapa berat tindakan itu bisa jadi berbeda-beda (Susanti, Eko Rahardjo, 2018).

 Menurut etimologi, kejahatan adalah jenis tindakan yang bertentangan dengan standar moral dalam ranah kemanusiaan. Kejahatan adalah tingkah laku atau tindakan yang sangat ditentang serta tidak disukai oleh masyarakat(Hadi & Mukhlis, 2022).

 Van Bemmelen menjelaskan, bahwa kejahatan adalah segala tindakan atau perbuatan yang tidak etis lagi merugikan yang memunculkan begitu banyak rasa ketidaktenangan di tengah-tengah masyarakat tertentu sehingga masyarakat tersebut berhak untuk melakukan pencelaan dan menyatakan penolakannya atas tindakan tersebut dalam bentuk pemberian nestapa yang sengaja diberikan karena tindakan tersebut(Hadi & Mukhlis, 2022).

 Selanjutnya pengertian kejahatan dapat dibagi atas 4 pendapat (Rumadan,2021) yaitu:

1. Juridis

Menurut pendapat ini, tidak perlu ada definisi khusus untuk kejahatan; Kejahatan cukup dimaknai sebagai semua tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan dalam peraturan yang ada dalam hukum pidana. Kejahatan adalah tindakan yang mengandung dua komponen utama: kesalahan dan melanggar hukum.

1. Sosiologis

Menurut Garfalo, kejahatan itu dianggap sebagai "delik alamiah umum". Para sarjana banyak menolak pendapat ini karena kejahatan adalah tindakan khusus. Namun, van memmeler menyatakan bahwa Garfalo berhasil menunjukkan karakteristik utama kejahatan: merugikan dan melanggar kesusilaan.

1. Penomenologis

Menurut pendapat ini bahwa sudah cukup untuk menentukan bahwa pembunuhan atau pencurian adalah kejahatan, sehingga perumusan kejahatan tidak lagi penting. Jika tindakan tertentu diketahui sebagai kejahatan, gejala-gejala tindakan itulah yang menunjukkan hakikatnya, dan gejala-gejala itulah yang menunjukkan hakikatnya. Oleh karena itu, karena phenomenologist ini hanya melihat kejahatan sebagai peristiwa tindakan seperti itu, maka diperlukanlah definisi. Salah satu kelemahan yang ada dalam pendapat ini adalah bahwa definisi kejahatan menjadi tidak jelas. Contohnya dalam hal berdusta, misalnya, tidak dianggap sebagai kejahatan dalam kriminologi. Akan tetapi, suatu rangkaian perbuatan dusta yang kita sebut penipuan merupakan tindakan kriminal.

1. Gabungan juridis-sosiologis

Oleh Van Bemmelen, berdasarkan aspek sosiologi, maka ada aspek yang dapat diambil dari Garfalo, yaitu kejahatan memiliki kandungan dua unsur pokok, yang pertama merugikan dan kedua melanggar kesusilaan.

Adanya kejahatan menurut Soerjono Soekanto dkk tergantung antara lain pada faktor-faktor kesempatan, pengalaman belajar dari pihak lain, imitasi dan identifikasi. Melalui pengalaman-pengalaman demikian seseorang (secara sadar atau tidak sadar) menciptakan konsepsi-konsepsi mengenai dirinya sebagai makhluk sosial. Sebagai konsekuensinya, selanjutnya individu akan bertingkah laku menurut konsepsi tersebut, tingkah laku mana saja dapat dikualifisir sebagai kejahatan oleh pihak-pihak lain ((Faisal, Nursariani Simatupang, 2017).

# **Kejahatan kekerasan**

Tidak ada definisi yuridis yang jelas dan menyeluruh tentang istilah "kejahatan kekerasan". Tidak ada ketentuan yang jelas tentang definisi "dengan kekerasan" dalam BAB IX KUHP, akan tetapi buku II KUHP mengatur jenis kejahatan yang dimaksud. Menurut Pasal 89 KUHP, "melakukan kekerasan" berarti membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). "Melakukan kekerasan" berarti "mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah", seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain-lain.

 Adapun berkaitan dengan pola-pola dalam kekerasan, Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky menyampaikan adanya empat kategori yang hampir mencakup semua pola-pola dalam kekerasan (Martha, Aroma Elmina, 2021), yakni:

1. Kekerasan legal

Kekerasan ini bisa berupa kekerasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti contohnya kekerasan yang dilakukan oleh tentara saat peperangan, atau kekerasan yang didukung oleh instrumen hukum.

1. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Faktor penting yang digunakan dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan dalam pemberlakuan sanksi sosial terhadap individu yang melakukan kekerasan.

1. Kekerasan Rasional

Beberapa kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan adalah tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh hukum tetapi tidak memiliki sanksi sosial. Pembunuhan dalam kerangka kejahatan terorganisasi, misalnya perjudian, pelacuran, dan peredaran narkotika, biasanya menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan lebih daripada individu lain yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

1. Kekerasan yang tidak berperasaan

Kekerasan yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa menunjukkan motivasi tertentu, dan biasanya pelaku juga tidak mengetahui korbannya. Ini juga disebut "kekerasan murni", yang merupakan manifestasi/perwujudan langsung dari adanya gangguan mental seseorang pada titik tertentu pada kehidupannya.

# **Ruang Lingkup dan Bentuk Kejahatan Kekerasan**

Kriminolog Indonesia membatasi kejahatan kekerasan berdasarkan proporsi karena KUHP tidak menetapkan aturan khusus untuk kategori ini. Mulyana W. Kusumah membagi kejahatan kekerasan menjadi kategori berikut (Widodo, Wahyu, 2015):

1. Kejahatan yang dilakukan terhadap kesusilaan, seperti ada dalam pasal 285 KUHP
2. Kejahatan dalam bentuk Penganiayaan, seperti dalam Pasal 351-Pasal 358 terutama khususnya penganiayaan berat (*swaremishan-deling*) dalam Pasal 354 dan 355 KUHP
3. Kejahatan-kejahatan seperti penodongan, pencurian dengan pemberatan perampokan, misalnya ada pada Pasal 365 KUHP.
4. Kejahatan yang mengakibatkan kematian atau luka karena kealpaan seseorang, sebagaimana ada dalam Pasal 359-Pasal 361 KUHP
5. Kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa orang, seperti dalam pasal 338-350 KUHP

Adapun Menurut pengertian dari kepolisian, yang termasuk jenis kejahatan dengan kekerasan antara lain dalam bentuk (Widodo, Wahyu, 2021):

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penganiayaan Berat
4. Perkosaan dan Penculikan
5. Pemerasan

Lebih lanjut, Pencurian dengan kekerasan menurut istilah yang ada dalam kepolisian adalah:

1. Pembegalan
2. Perampokan
3. Penjambretan
4. Perampasan, dan
5. Penodongan.

# **Pengertian Anak**

Anak merupakan bagian yang penting dari keberlangsungan hidup manusia, negara dan bangsa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sederhananya, anak adalah investasi bangsa dalam hal sumber daya manusia. Selain itu, konstitusi menegaskan bahwa anak-anak, sebagai tunas serta generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang teramat strategis dan potensial, serta memiliki sifat khusus. Sehingga, anak-anak harus dilindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

 Sebagian besar undang-undang yang berkaitan dengan masalah anak memiliki definisi yang berbeda tentang anak. Hal ini disebabkan fakta bahwa undang-undang tersebut menetapkan batasan yang jelas sesuai dengan tujuan dan tujuan mereka dibuat.

Berbicara tentang masalah anak sangat berkaitan dengan apa itu anak dan usia apa yang disebut anak. Anak memiliki banyak pengertian(Harun & Wati, t.t.), yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 butir 2 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah kawin/menikah" Dengan kalimat ini,maka unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun
2. Belum pernah kawin/menikah secara resmi.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 butir 5 berisi bahwa anak adalah "setiap manusia yang berumur/berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan juga belum menikah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan apabila hal itu demi kepentingannya." Dengan kalimat ini, unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah Manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun
2. belum menikah secara resmi.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,” demikian bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Konvensi Hak Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak dengan jelas, menyatakan bahwa "Untuk tujuan konvensi ini, seorang anak dimaknai sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Definisi Anak yang tercantum dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah sebagai berikut:

1. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian kecil menentukan bahwa anak adalah manusia yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun (Undang Kesejahteraan Anak, KUHPdt)
2. Sebagian besar menentukan bahwa anak adalah manusia yang berusia di bawah18 (delapan belas) tahun (Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, KHA dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang menetapkan batas minimal 12 tahun).

# **Kriminologi**

Kriminologi adalah bidang yang menyelidiki kejahatan dan individu yang melakukannya, termasuk bagaimana individu yang melakukan kejahatan melakukannya, berusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan dan cara mencarinya, dan mencari cara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. P. Topinard (1830-1911), seorang antropolog Perancis, pertama kali menggunakan istilah kriminologi pada tahun 1879, meskipun istilah sebelumnya adalah antropologi kriminal, yang juga banyak digunakan(Susanti, Emilia Rahardjo, 2018).

Secara etimologis Kriminologi berasal dari kata crime dan Logos. Krime berarti kejahatan, sedangkan Logos berarti ilmu pengetahuan. Dari kedua definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Banyak teori yang dikemukakan para peneliti tentang kriminologi artinya setiap pengertian berlaku pada banyak mata pelajaran yang dicakup oleh kajian kriminologi. Kriminologi sebagai suatu ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri, tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang: ada yang melihat kejahatan dari segi keadaan di mana kejahatan itu terjadi, dan ada pula yang melihat kejahatan dan berbicara. dari karakter dan perilaku. perilaku yang menyimpang dari norma-norma kehidupan bermasyarakat. Secara teknis semua itu tidak lepas dari berbagai bidang keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan kajian (Susanti, Emilia Rahardjo, 2018).